

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI I DPR RI
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN
NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA
KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS,
KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)**

Tahun Sidang : 2012-2013
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Kamis, 7 Februari 2013
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Pimpinan Rapat : Drs. Ramadhan Pohan, MIS.
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara : Lanjutan RDP Komisi I DPR RI dengan KPI Pusat tanggal 28 Januari 2013
Hadir : 1. 32 orang dari 47 orang Anggota Komisi I DPR RI
2. KPI Pusat:
a. Mochamad Riyanto, Ketua
b. Ezki Tri Rezeki Widiarti, Wakil Ketua
c. Yazirwan Uyun, Anggota
d. Dadang Rahmat Hidayat, Anggota
e. Nina Mutmainnah, Anggota
f. Azimah Subagijo, Anggota
g. Idy Muzayyad, Anggota
h. Judhariksawan, Anggota
i. Iswandi Syahputra, Anggota
beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan KPI Pusat pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2013 dengan acara sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Ramadhan Pohan, MIS., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI minta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk terus meningkatkan kinerja, baik di bidang kelembagaan, infrastruktur dan perijinan, program isi siaran, serta bekerjasama dengan KPI Daerah dan *stakeholder* terkait lainnya, sehingga KPI Pusat dapat melaksanakan program kerja 2013 dan mewujudkan visi “terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.”
2. Komisi I DPR RI mendesak KPI Pusat untuk memprioritaskan pengawasan penyelenggaraan penyiaran di wilayah perbatasan di seluruh wilayah Republik Indonesia, khususnya pengawasan program isi siaran, termasuk tayangan konten lokal, sosialisasi dan penyuluhan, serta mengajak berbagai pihak terkait untuk bersama-sama menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui sistem penyiaran nasional.
3. Komisi I DPR RI mendorong KPI Pusat untuk menyusun kajian secara komprehensif dan detail mengenai digitalisasi, baik dari aspek kesepakatan/perjanjian internasional, perbandingan di berbagai negara dalam melaksanakan program digitalisasi, serta analisis dalam bentuk saran dan masukan terhadap program digitalisasi yang sedang dijalankan oleh Pemerintah.
4. Komisi I DPR RI mendesak KPI Pusat untuk berkoordinasi/bekerjasama dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rangka menegakkan prinsip *diversity of ownership* dan *diversity of content* sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku guna mengantisipasi terjadinya monopoli kepemilikan media, serta melakukan kajian terkait dengan kepemilikan media.
5. Komisi I DPR RI mendukung langkah penguatan KPI Pusat dan KPI Daerah sebagai penyelenggara penyiaran yang merupakan wujud peran serta masyarakat terhadap penyiaran, melalui penguatan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, program, dan dukungan anggaran.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 7 Februari 2013
KETUA RAPAT,

Drs. RAMADHAN POHAN, MIS.
A-520